



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

PENUNJUKAN / PENETAPAN KEPALA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, PENGGUNA BARANG
DAN KUASA PENGGUNA BARANG TAHUN ANGGARAN 2022

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa Kepala Daerah selaku Kepala Pemerintahan Daerah adalah Pemegang Kekuasaan Keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemimpinan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
- b. bahwa Kepala Daerah selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah melimpahkan sebagian kekuasaannya kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran, Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang pada Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penunjukan/Penetapan Kepala Organisasi Perangkat Daerah Selaku Pejabat Pengguna Anggaran, Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang Organisasi Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80 sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2011 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6420);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42) ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 926);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

14. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2014 Nomor 4 ,Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 294);
15. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2022,(Lembaran Daerah Kota Ambon 2022 Nomor);
16. Peraturan Walikota Ambon Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Menunjuk dan Menetapkan Kepala Organisasi Perangkat Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran, Pengguna Barang Kuasa Pengguna Barang Pada Organisasi Perangkat Daerah yang dipimpinnya, sebagaimana terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ;
- KEDUA : Kepala Organisasi Perangkat Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran, Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang pada Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berkaitan dengan peran dan fungsinya dalam membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah termasuk Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang;
- KETIGA : Kepala Organisasi Perangkat Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran, Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA mempunyai tugas :
1. Menyusun RKA-SKPD;
 2. Menyusun DPA-SKPD;
 3. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan / atau Pengeluaran Pembiayaan;
 4. Melaksanakan Anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 5. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 6. Melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
 7. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 8. Menandatangani SPM;
 9. Mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggungjawab SKPD yang di pimpinnya;
 10. Menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan SKPD yang dipimpinnya;
 11. Mengawasi Pelaksanaan Anggaran SKPD yang di pimpinnya;
 12. Menetapkan PPTK dan PPK-SKPD;

13. Menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang di pimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan
14. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain tugas kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas lainnya, meliputi :

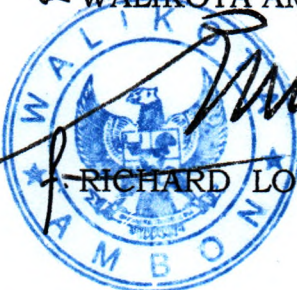
1. Menyusun anggaran kas SKPD;
2. Melaksanakan pemungutan lain-lain pendapatan asli daerah;
3. Menyusun dan menandatangani dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
4. Menyusun dan menandatangani dokumen Pemberian Bantuan Sosial;
5. Menyusun dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan belanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah, BUD melakukan Pencatatan dan Pengesahan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah tersebut dan ;
6. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang di pimpinnya kepada PPKD selaku BUD.

Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran (PA) mempunyai wewenang, meliputi ;

1. Menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang di pimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan.
2. Menetapkan Pembantu Bendahra Penerimaan, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Pembantu bendahara pembantu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenang kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon,
pada tanggal, 3 Januari 2022

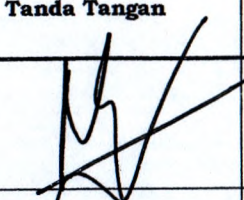
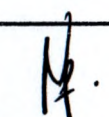
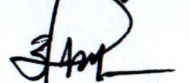
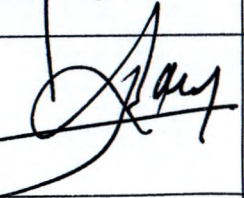
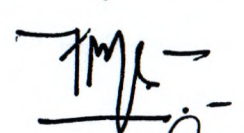
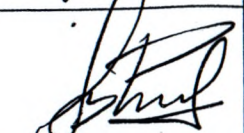
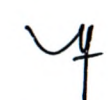
WALIKOTA AMBON

RICHARD LOUHENAPESSEY

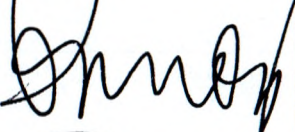
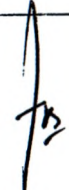
Tembusan kepada:

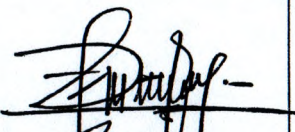
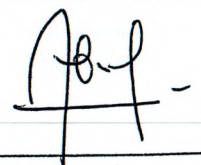
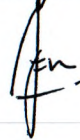
1. Sekretaris Kota Ambon;
2. Kepala Organisasi Perangkat Daerah
Dalam Lingkup Pemerintah Kota Ambon.

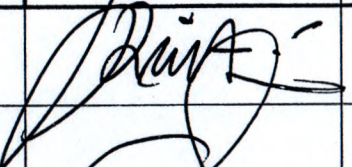
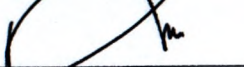
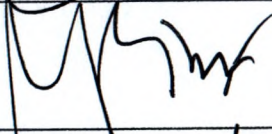
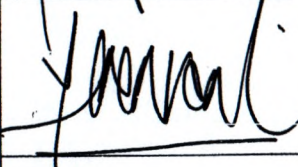
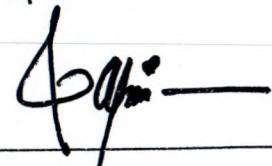
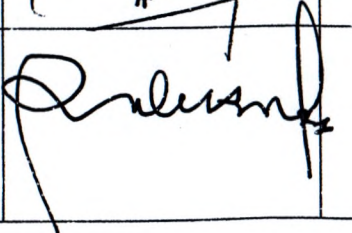
LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
 Nomor : 6 Tahun 2022
 Tanggal : 3 Januari - Tahun 2022
 Tentang : Penunjukan/Penetapan Kepala Organisasi
 Perangkat Daerah selaku Pejabat Pengguna
 Anggaran, Pengguna Barang dan Kuasa
 Pengguna Barang Tahun Anggaran 2022

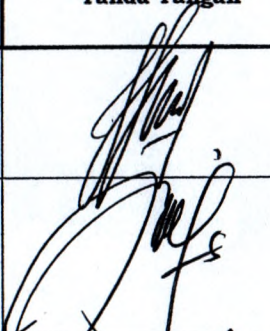
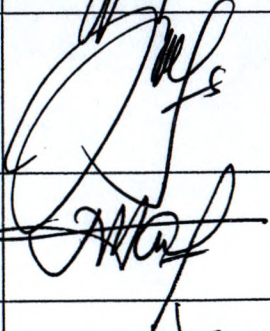
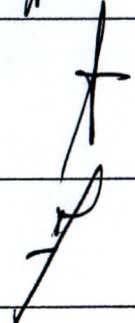
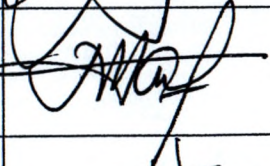
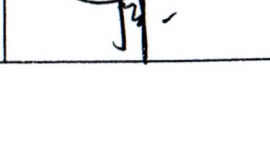
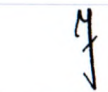
No	Nama/Pangkat/Golongan	Jabatan	Tanda Tangan	Paraf
1.	Drs.Agus Ririmasse, AP.M.Si Pembina Utama Muda (IV/c) NIP: 19750222 199311 1 003	Sekretaris Kota Ambon		
2.	Drs.Ferdinandus Fredrik Taso, M.Si Pembina Tingkat I NIP: 19750525 199503 1 002	Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon		
3	Drg.Wendy Pelupessy Pembina Tk.I NIP. 19680424 200003 2 008	Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon		
4	M.Latuihamallo.ST.MT Pembina Utama Muda NIP. 19690510 20012 1 006	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Ambon		

No	Nama/Pangkat/Golongan	Jabatan	Tanda Tangan	Paraf
5	Drs. N. Edwin. J. Pattikawa Pembina Utama Muda NIP. 19690830 199603 1 003	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Ambon		
6	Rustam Simanjuntak, ST, MT Pembina Tk. I NIP: 19670812 200012 1 006	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman Kota Ambon		
7	Josias. P. Loppies, S. Sos, MH Pembina Tingkat I NIP. 19660305 198603 1 018	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ambon		
8	Dr. Nurhajati Jasin Pembina Tk. I NIP. 19630626 199703 2 001	Kepala Dinas Sosial Kota Ambon		
9	Ir. Steiven Bernhard Patty, M. Si Pembina Utama Muda NIP : 19670906 199303 1 016	Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon		
10	M. M. Lekatompessy, S. STP, M. Si Pembina Tk I NIP : 19780314 199612 2 001	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Masyarakat, dan Desa Kota Ambon		

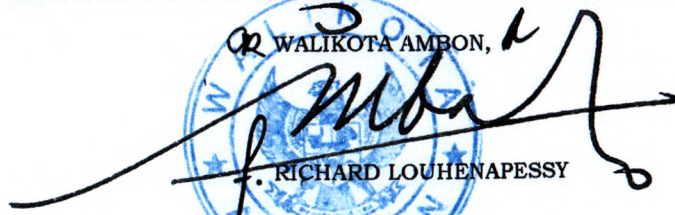
No	Nama/Pangkat/Golongan	Jabatan	Tanda Tangan	Paraf
11	A.J.Hehamahua.AP.M.Si Pembina Tkt I NIP : 19770507 199511 1 001	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon		
12	Marcella Haurissa, SE,M.Si Pembina Tingkat I NIP. 19650806 199402 2 003	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon		
13	Ir.Juliana Wihelmina Patty Pembina Utama Muda NIP. 19680114 199312 2 001	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ambon		
14	Roberth Sapulette, ST, MT Pembina NIP : 19691205 200012 1 004	Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon		
15	Drs.Joy.R.Adriaansz.M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19770320 199511 1 001	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Ambon		
16	Drs,Marthin Keiluhu Pembina Utama Muda NIP. 19621119 199103 1 006	Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Ambon		

No	Nama/Pangkat/Golongan	Jabatan	Tanda Tangan	Paraf
17	Ir. Ferdinanda J. Louhenapessy Pembina Utama Muda NIP : 19630215 199203 2 004	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ambon		
18	Richard Luhukay, AP Pembina Tk.I NIP : 19760710 199511 1 001	Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Ambon		
19	Petrus.P.Pattiasina, S.Pd Pembina Utama Muda NIP : 19640629 198803 1 009	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Ambon		
20	Feberien Maa'il.S.Pi.MT Pembina Tk.I <i>Utama Muda</i> NIP : 19720206 200003 2 002 <i>19700213 199603 2 003</i>	Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Ambon		
21	Munawar.S.S.Rustam Hayat, SE,.M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19651209 199603 1 003	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Ambon		
22	Ir. Gustaf Dominggus S. Nendissa Pembina Utama Muda NIP : 19640311 199103 1 011	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Ambon		

No	Nama/Pangkat/Golongan	Jabatan	Tanda Tangan	Paraf
23	Sirjohn Slamanat, SH, MH Pembina Tingkat I NIP: 19650405 199403 1 010	Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Ambon		
24	Steven Domingus, S, IP, M. Si Pembina Tkt I NIP : 19730916 199203 1 0023	Sekretaris DPRD Kota Ambon		
25	Jacob Silanno, SE, M. Si Pembina Utama Muda NIP. 19670624 199303 1 014	Inspektur Kota Ambon		
26	Ir. E.R. Matitaputty, M.Tech Pembina Utama Muda NIP. 19691130 199703 1 004	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Ambon		
27	Apries.B.Gaspersz, S.STP.M.Si Pembina Tk.I NIP. 19770409 199602 1 003	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon		
28	Drs. Benedictus Selanno, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19630320 198603 1 018	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Ambon		
29	R.S.de.Fretes, SE, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19660426 199603 1 002	Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Ambon		

No	Nama/Pangkat/Golongan	Jabatan	Tanda Tangan	Paraf
30	Yan.D.Suitela, S.STP Pembina Tingkat I NIP.19790608 199803 1 003	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Ambon		
31	Drs.D.Paaia.MH Pembina Utama Muda NIP.19630224 199402 1 002	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ambon		
32	Nelce Latuny, S.Sos Pembina Tkt I NIP.19651219 198603 2 011	Camat Nusaniwe Kota Ambon		
33	M.A.Waliulu, S.STP Penata Tk I NIP.19820319 200112 1 005	Camat Sirimau Kota Ambon		
34	L.Lekatompeasy, SE Pembina Tkt I NIP.19690309 198902 2 001	Camat Teluk Ambon Baguala Kota Ambon		

No	Nama/Pangkat/Golongan	Jabatan	Tanda Tangan	Paraf
35	Imelda.A.Tahalele, S.STP Penata TK I NIP.19800706 199912 2 001	Camat Teluk Ambon Kota Ambon		
36	A.O. Pattikawa, S.Sos Penata Tkt I NIP.19670207 199002 1 001	Camat Leitimur Selatan Kota Ambon		


 WALIKOTA AMBON,
 RICHARD LOUHENAPESSY